

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu daerah tidak hanya di perlukan rakyat dan pemerintah saja, tetapi diperlukan juga suatu ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung adanya percepatan pertumbuhan kearah yang lebih baik, hal itu dapat diwujudkan dalam kegiatan pembangunan dalam segala bidang. Untuk melakukan pembangunan, diperlukan landasan yang kuat antara lain pengambilan kebijakan yang tepat, akurat dan terarah supaya hasil yang tercapai benar-benar dengan yang diharapkan.

Struktur perekonomian adalah susunan elemen-elemen yang ada dalam suatu negara yang berfungsi untuk mengatur rumah tangga suatu negara yang mana di dalamnya terdiri dari : sistem perekonomian rumah tangga, perusahaan, pemerintah, pasar input dan pasar output. Semua komponen-komponen tersebut mempunyai kegiatan ekonomi yang berbeda. Elemen-elemen dari suatu perekonomian terdiri dari pasar input (faktor produksi), pasar output (barang dan jasa), rumah tangga, perusahaan, pemerintah dan sistem ekonomi. Elemen-elemen tersebut berpengaruh layaknya struktur organisasi. Struktur perekonomian juga memperlihatkan satuab-satuan perekonomian, hubungan-hubungan dan saluran-saluran wewenang dan tagging jawab yang ada dalam suatu perekonmian (Kusuma, 2016).

Dalam tulisan (Hasang, 2016) Dumairy (2007) struktur perekonomian suatu negara dapat dilihat dari berbagai sudut tinjauan. Setidak-tidaknya struktur perekonomian dapat dilihat dari empat sudut tinjauan, yaitu tinjauan makro-sektoral,

tinjauan keuangan, tinjauan penyelenggaraan kenegaraan, dan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan. Berdasarkan tinjauan makro-sektoral perekonomian suatu negara dapat berstruktur agraris, industri, atau niaga. Hal ini tergantung pada sektor apa/mana yang dapat menjadi tulang punggung perekonomian Negara yang bersangkutan. Dilihat secara makro sektoral dalam bentuk produk domestik bruto maka struktur perekonomian Indonesia sampai tahun 1990-an masih agraris, namun sekarang sudah berstruktur industri. Berdasarkan tinjauan keruangan perekonomian dapat dinyatakan berstruktur kedesaan / tradisional dan berstruktur kekotaan/modern. Ditinjau dari sudut pandang keruangan, struktur perekonomian telah bergeser dari struktur pedesaan menjadi struktur perkotaan. Hal ini dapat kita lihat dan kita rasakan sejak Pelita I hingga era reformasi sekarang ini. Kemajuan perekonomian di kota-kota jauh lebih besar dibandingkan dengan perdesaan. Hal ini disebabkan pembangunan industri-industri pengolahan di daerah perkotaan dan juga makin berkembangnya sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi.

Berdasarkan tinjauan penyelenggara kenegaraan, struktur perekonomian dapat dibedakan menjadi struktur estitis, egaliter, atau borjuis. Predikat ini bergantung pada siapa atau kalangan mana yang menjadi pemeran utama dalam perekonomian yang bersangkutan, yaitu bisa pemerintah/negara, bisa rakyat kebanyakan atau kalangan pemodal dan usahawan. Struktur ekonomi Indonesia sejak awal Orde Baru hingga pertengahan dasawarsa 1980-an berstruktur etatis dimana pemerintah atau Negara dengan BUMN dan BUMD merupakan pelaku utama perekonomian Indonesia. Mulai pertengahan dasawarsa 1990-an peran pemerintah dalam perekonomian berangsur-angsur dikurangi, Struktur ekonomi

untuk sementara adalah ke perekonomian yang berstruktur borjuis, dan belum mengarah ke struktur perekonomian yang egaliter, karena baru kalangan pemodal dan usahawan kuatlah yang dapat dengan cepat menanggapi undangan dari pemerintah tersebut.

Pembangunan ekonomi regional merupakan implementasi dari pembangunan nasional yang di laksanakan di suatu daerah. Tolak ukur ekonomi dapat diketahui berdasarkan tingkat struktur produksi dan penyerapan tenaga kerja (*employment*). Pembangunan wilayah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing wilayahnya, mengurangi ketimpangan antar wilayah dimana pembangunan wilayah yang strategis dan berkualitas dapat memajukan kehidupan masyarakat (Jafar & Meilvidiri, 2021).

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan dapat juga di artikan sebagai poses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan.

Peningkatan pertumbuhan ini tidak dapat dihindari lagi akan mengakibatkan perubahan struktural. Perubahan struktural merupakan suatu rangkaian perubahan yang saling terkait satu sama lain antara permintaan agregat, perdagangan luar negeri (ekspor-impor), penawaran agregat (produksi dan penggunaan factor produksi) yang disebabkan oleh adanya proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi terjadi dengan perubahan struktur ekonomi dalam perekonomian. Kenaikan output menandakan bertambahnya produksi sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat,

permintaan ekspor yang meningkat pertumbuhan ekonomi yang dimana hal ini akan mengakibatkan pergeseran struktur ekonomi. Kuznet mendefenisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kemampuan suatu negara menyediakan barang-barang ekonomi yang meningkat bagi penduduknya atau kenaikan output nasional secara terus menerus. Pernyataan tersebut di dukung oleh teori sektor ekonomi yaitu kenaikan dalam sektor industri (sektor sekunder) dan kemudian kenaikan dalam industri jasa (K. Lestari & Jannah, 201 C.E.)

Pembangunan daerah sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi memprioritaskan untuk membangun dan memperkuat sektor-sektor di bidang ekonomi dengan mengembangkan, meningkatkan dan mendayagunakan sumber daya secara optimal dengan tetap memperhatikan ketentuan antara industri dan pertanian yang tangguh serta sektor pembangunan lainnya.

Sektor ekonomi terdiri atas tujuh belas sektor yaitu: (1) pertanian, kehutanan, dan perkebunan; (2) pertambangan dan penggalan; (3) industri pengolahan; (4) pengadaan listrik dan gas; (5) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; (6) konstruksi; (7) perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; (8) transportasi dan pergudangan; (9) penyediaan akomodasi dan makan minum; (10) informasi komunikasi; (11) jasa keuangan dan asuransi; (12) real estate; (13) jasa (Adyatama, 2018) perusahaan; (14) administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan social wajib; (15) jasa pendidikan; (16) jasa kesehatan dan kegiatan social; (17) jasa lainnya (Adyatama, 2018)

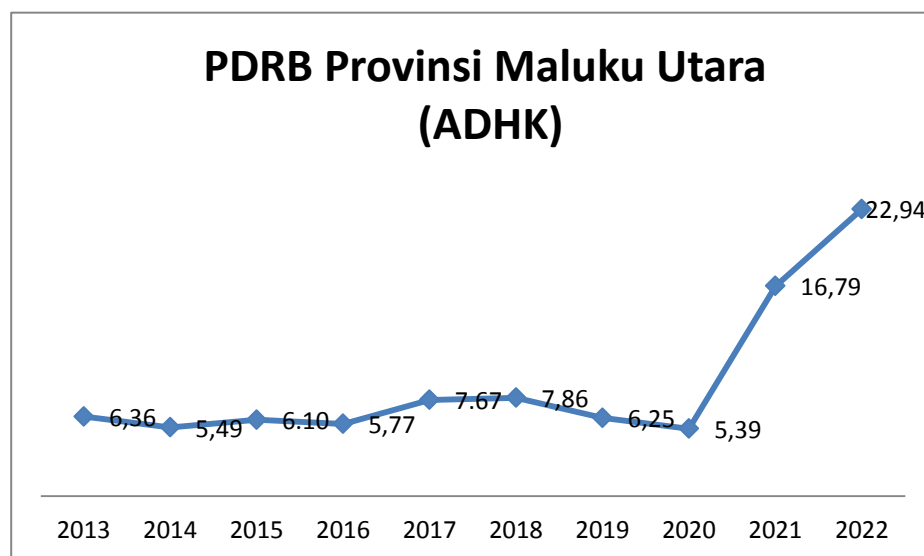
Provinsi Maluku Utara dikelilingi beberapa pulau dan memiliki Kabupaten dan Kota yaitu Kepulauan Sula, Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Barat,

Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Ternate dan Tidore. Provinsi Maluku Utara juga memiliki kekayaan alam dan sumber daya alam yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Apalagi kekayaan laut di Provinsi Maluku Utara ini melimpah dan keasrian bawah laut disana masih terjaga, dengan karakteristik perairan yang demikian. Potensi pengembangan sumber daya alam dapat ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Maluku Utara. Segala upaya dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk memaksimalkan segala potensi yang dimiliki wilayah telah berjalan dengan baik. Pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan penggunaan input dan memperbaiki proses ekonomi. Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan input dan memperbaiki proses ekonomi adalah bukti Pemerintahan Provinsi Maluku Utara mampu untuk mengelolah kekayaan wilayah sendiri dan berusaha menciptakan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. (Sianturi & Harahap, 2021)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dalam suatu daerah. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara terus mengalami perlambatan dari pertumbuhan 7,86 persen tahun 2018 menjadi 6,25 persen tahun 2019 dan 5,39 persen tahun 2020. Kemudian meningkat dengan pertumbuhan 16,79 persen pada tahun 2021 dan 22,94 persen tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan yang signifikan pada aktivitas dua sektor utama, yaitu sektor pertambangan dan

penggalian serta industry pengolahan sejak tahun 2021 seiring dengan beroperasinya produksi pengolahan biji nikel di beberapa daerah. Maka itu untuk melihat laju PDRB di Provinsi Maluku Utara tahun 2013-2022 pada gambar grafik berikut:

Gambar 1.1 Presentase Laju PDRB Provinsi Maluku Utara tahun 2013-2022 (ADHK)



Sumber : Badan Pusat Statistik

Jika dilihat dari presentase tingkat laju PDRB provinsi Maluku Utara termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami fluktuasi angka laju pertumbuhan ekonomi. Seperti yang terlihat pada gambar diatas dalam tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yaitu sebesar 6,36%, di dalam tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Maluku Utara melambat dengan angka sebanyak 5,49%, dan dalam tahun 2015 tingkat pertumbuhan ekonomi Maluku Utara sedikit mengalami kenaikan menjadi 6,10%. Pada tahun 2016 Provinsi Maluku Utara mengalami penurunan laju pertumbuhan ekonomi kembali menjadi 5,77%, akan tetapi di tahun

2017 tingkat pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mulai naik menjadi 7,67% dan dalam tahun 2018 juga naik menjadi 7,86%. Di tahun 2019 angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara menurun menjadi 6,25%, dan dalam tahun 2020 pertumbuhan ekonom menurun lagi keangka 5,39%. Pada tahun 2021 naik sebesar 16,79% Provinsi Maluku Utara, di tahun 2022 provinsi Maluku utara berhasil mengalami kenaikan angka pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 22,94% yang dimana jumlah ini termasuk angka pertumbuhan ekonomi tertinggi disuluruh Provinsi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka penelitian ini, merujuk pada penelitian Endah Kurnia Lestari dan Olvi Mifta Alfiatul Jannah tentang " analisis penentuan sektor kunci perekonomian wilayah kabupaten belitung timur ". sehingga peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul "Analisis input output Struktur Ekonomi Di Provinsi Maluku Utara".

1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar permasalahan di atas maka persoalan-persoalan yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sektor apa saja yang menjadi sektor kunci dalam struktur perekonomian Provinsi Maluku Utara berdasarkan tabel Input Output provinsi maluku utara ?
2. Peran sector Pertambangan terhadap perekonomian Provinsi Maluku Utara !

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis sector apakah yang menjadi sector unggulan di Provinsi Maluku Utara.
2. Mengetahui dan menganalisis peran sector Pertambangan terhadap Perekonomian provinsi Maluku utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.
2. Sebagai salah satu sumber informasi tentang masalah sector ekonomi dan sector unggulan di suatu daerah.